

FALSIFIKASI KARL POPPER DAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA: MENEMUKAN PARARELITAS, MELAWAN TUDUHAN IRRELEVANSI DAN AMBRUKNYA FILSAFAT

Oleh: Paulus Berekama Tukan
(Mahasiswa Semester VII Prodi Filsafat
IFTK Ledalero)
Email: paulamatukan@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan memperlihatkan paralelitas antara sistem demokrasi di Indonesia dan teori falsifikasi Karl Popper sebagai sebuah produk filsafat. Hipotesis dasar yang diajukan ialah falsifikasi dan demokrasi memiliki kesamaan paradigma yaitu dalam upaya menguji dan memeriksa proposisi ilmiah di satu sisi dan mencermati kebijakan-kebijakan publik, di sisi lain. Pertama, Penulis akan memperlihatkan letak persoalan dalam demokrasi terutama krisis demokrasi akibat pengakuan kebenaran tunggal lebih-lebih oleh kaum agamawan ekstremis-radikal. Selain itu, disinggung juga tuduhan irrelevansi dan ambruknya Filsafat dewasa ini. Pada bagian berikut, Penulis akan menguraikan teori falsifikasi Karl Popper. Di sini, Penulis akan menunjukkan prinsip-prinsip falsifikasi secara tegas. Selanjutnya, Penulis akan menguraikan sistem sistem demokrasi di Indonesia. Dari dua uraian ini, Penulis pada akhirnya membuktikan paralelitas antara demokrasi dan falsifikasi dan menunjukkan di mana letak paralelitas itu. Artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan umum dan tesis kunci bahwa baik falsifikasi maupun

demokrasi, pengujian terhadap suatu proposisi mesti berlangsung terus menerus dan karena itu pengakuan kebenaran tunggal merupakan sebuah upaya mencederai demokrasi dan melawan prinsip ilmiah. Dengan pembuktian ini, Filsafat dengan demikian dapat dikatakan masih relevan dengan produk berupa metode dan prinsip berpikir bagi kehidupan berdemokrasi dewasa ini bahkan ia menjadi basis konstruksi demokrasi secara tegas.

Kata-kata kunci: Falsifikasi, Demokrasi, Demokrasi di Indonesia

I. Pendahuluan

Di Indonesia, klaim-klaim kebenaran tunggal masih menjadi persoalan krusial. Alih-alih memperjuangkan kebenaran Allah, penganut agama ekstremis-radikal hadir ke ruang publik untuk memproklamasikan identitas agamanya. Front Pembela Islam (FPI), salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia dibubarkan secara *de jure* pada tanggal 21 Juni 2019 dengan alasan utama, pengurus dan anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang di antaranya dijatuhi pidana.¹ FPI terbukti sebagai salah satu Ormas yang tidak mempertimbangkan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.² Kendati telah dibubarkan tiga tahun silam, secara *de facto* FPI dipastikan masih ada Indonesia dan berrasosiasi secara senyap. Pendakuan kebenaran melalui Ormas-Ormas yang berbasis agama di Indonesia ini kerap menjadi penyebab terbesar krisis demokrasi di Indonesia karena postulat kebenaran Allah dipakai sebagai legitimasi tindakan politisnya serentak meminggirkan kebenaran lain.³

1 Fitria Chusna Farisa, "6 Alasan Pemerintah Bubar dan Larang Kegiatan FPI", dalam *Kompas.com* <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>, diakses pada 30 November 2021.

2 *Ibid.*

3 Ninin Prima Damayanti, dkk, "Radikalisme Agama sebagai salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3:1

Masih tentang demokrasi, *The Economist Intelligence Unit* (EUI) menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia di era Pemerintahan Jokowi menurun dari angka 6,48 ke 6,3.⁴ Indonesia menempati posisi keempat di Asia Tenggara. Terdapat lima indikator laporan tersebut yakni pemilihan umum dan pluralisme, kinerja pemerintah, budaya politik, partisipasi politik dan kebebasan sipil. Isu Pluralisme masih menjadi isu sentral dalam ruang demokrasi di Indonesia. Hal mana disebabkan oleh selebrasi nilai-nilai primordial dan sektarian berbasis keyakinan agama. Demikian pun, kehadiran *Buzzer* politik yang menghamba pada kepentingan penguasa justru menggaungkan narasi-narasi yang memproteksi kebijakan-kebijakan publik kekuasaan (baca: pemerintah) dan melumpuhkan oposisi dan kritisisme melalui ruang digital.⁵ Ruang demokrasi menjadi beku karena tidak ada pertarungan argumentasi yang sehat. Sebaliknya, pertarungan sentimen justru semakin tak terkontrol. Persis, Pluralisme secara umum masih menjadi kendala krusial di Indonesia.

Berhadapan dengan situasi sosial-politis semacam ini, Filsafat diserbu dengan pertanyaan mendasar, apa sebenarnya kontribusi Filsafat? Filsafat dituduh irrelevan dan telah ambruk dengan dua alasan; Filsafat hanya dapat menciptakan sofisme di ruang publik dan karena itu hanya akan menciptakan kegaduhan,⁶ di satu sisi dan Filsafat tidak mampu secara spesifik menciptakan pernyataan yang sungguh dapat diverifikasi (bahkan dijadikan pegangan) sebagaimana ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam, di lain sisi.⁷ Filsafat sungguh “ditendang” oleh saintisme yang

(Departemen Kriminologi UI, 2003), hlm. 47-48.

- 4 Cindy Mutiar Anurr, “Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi cenderung Menurun”, dalam *databoks.katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>, diakses pada 4 Oktober 2022.
- 5 Paulus Berekama Tukan, “Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?”, *Akademika* 30:2 (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022), hlm. 51-52.
- 6 Aly Asgari Yazdi, *Sejarah Skeptisisme, Jatuh Bangun Paham Keraguan atas Kebenaran* (Jakarta: Sadra Press, 2016), hlm. 58-60.
- 7 Secara global, tuduhan ini lebih diinspirasi oleh pernyataan yang sangat fenomenal dari Stephen Hawking, seorang fisikawan dunia saat berbicara di *Google Zeitgeist Conference* di Hertfordshire pada tahun 2011. Demikian Hawking, “Ketika kita bertanya tentang: Mengapa kita ada di sini dan dari mana kita berasal? Secara tradisional mungkin pertanyaan ini lebih dianggap sebagai pertanyaan-pertanyaan filsafat, tetapi

begitu memuncak dewasa ini serentak oleh klaim suatu tatanan politik yang begitu mapan. Pada titik ini, hemat Penulis, teori Falsifikasi Karl Popper tepat untuk dijadikan pendasaran kunci membela Filsafat dengan menunjukkan keampuhannya memberantas upaya klaim kebenaran sepihak dan membangun demokrasi yang ideal. Sebuah prinsip yang menjadi dasar pijak konstruksi sebuah negara demokrasi. Lantas, pertanyaan mendasarnya ialah bagaimana menemukan paralelitas antara Falsifikasi dan Demokrasi? Di mana letak paralelitas itu?

II. Karl Popper dan Teori Falsifikasi

Karl Raymond Popper adalah seorang filsuf kelahiran Wina, Austria pada 28 Juli 1902. Popper melancarkan serangan kepada kaum positivis yang memandang data-data empiris sebagai satu-satunya kriteria bagi ilmu pengetahuan. Kaum positivis karena itu beranggapan bahwa metode yang dipakai dalam ilmu pengetahuan adalah metode verifikasi. Fakta-fakta hanya dicari untuk mempertegas teori.⁸ Positivisme diklaim telah menjangar dalam lingkup praktik ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Karena itu, Popper melancarkan kritik terhadap praktik-praktik positivis itu.

Kritik yang Popper maksudkan ialah pendekatan rasional ilmiah untuk menguji sebuah anggapan dan hipotesis. Popper menggagas teori kritik ini dengan sebutan teori Falsifikasi. Teori ini digagas Popper dalam bukunya *Logik der Forschung* yang terbit tahun 1934. Teori ini membuat pembalikan secara radikal atas tendensi positivisme yang cenderung mengagungkan verifikasi sebagai satu-satunya kriterium kebenaran ilmiah. Positivisme membuat distingsi antara pernyataan yang bermakna (*meaningfull*) dan tidak bermakna (*meaningless*). Pernyataan yang bermakna adalah pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris sesuai dengan fakta-fakta indrawi. Sedangkan pernyataan yang tidak

sayang, filsafat sudah mati.", Fadlin, "Stephen Hawking dan Kematian Filsafat", *alif.id*. <https://alif.id/read/fdl/stephen-hawking-dan-kematian-filsafat-b236614p/>, diakses pada 21 Oktober 2022.

8 Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 52.

bermakna adalah pernyataan yang tidak dapat diverifikasi secara empiris seperti pernyataan metafisis-filosofis.

Menurut Popper, kebenaran ilmu pengetahuan bukan dibuktikan dari verifikasi terhadap fakta-fakta yang ada sebab hal ini tidak menjadi sebuah kriterium tunggal ilmu pengetahuan.⁹ Sebuah teori dapat dikatakan ilmiah kalau teori tersebut terbuka terhadap kritik dan terbuka terhadap penilaian orang lain.¹⁰ Dengan kata lain, ilmu mesti melihat kesalahan dalam proposi-proposisinya. Bagi Popper, jika semakin dikritik maka sebuah teori semakin rasional dan ilmiah. Prinsip keterbukaan justru membawa ilmu itu semakin dekat pada kebenaran.

Popper secara kritis melihat kaum positivistik justru menjadikan data untuk mengkonfirmasi teori. Hal ini tentu tidak sah dan bahkan sebuah penyimpangan mengingat kebenaran selalu terbuka terhadap kemungkinan kebenaran baru. Berbeda dengan kaum positivistik, Popper justru menjadikan data empiris sebagai sarana kritik terhadap teori.¹¹

2.1 Masalah Demarkasi

Popper menganggap bahwa kaum positivistik gagal membuat demarkasi antara ilmu pengetahuan dan metafisika. Kaum positivis hanya menyangkal metafisika sebagai yang tidak bermakna tanpa menjelaskan ciri ilmiah dari ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan dapat dibedakan dari metafisika. Karena itu, Popper mengusulkan tiga kriteria demarkasi¹²:

Pertama, seluruh proposisi ilmiah dan ilmu pengetahuan harus bersifat sintesis. Artinya rumusan-rumusan ilmiah mesti berangkat dari kenyataan. Dengan demikian, Popper sebenarnya ingin membuat spesialisasi terhadap ilmu empiris sebagai ilmu yang menangani bidang khusus yaitu pengamatan terhadap fakta-fakta, memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta dan merumuskan pernyataan-pernyataan sintesis.

9 Dr. Zaprul Khan, S. Sos, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 147.

10 Mikhael Dua, *op. cit.*, hlm. 54.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*, hlm. 63.

Kedua, semua proposisi ilmiah tidak mesti bersifat metafisik. Dengan demikian, tampak jelas bahwa Popper sebenarnya sudah membuat distingsi yang jelas bagi semua jenis ilmu baik empiris maupun metafisika, logika dan matematika untuk menekuni dan berkuat pada metodenya masing-masing. Di sini, Popper dengan tegas mengusulkan bahwa positivisme sebaiknya tetap memfokuskan diri pada pengamatan atas fakta. Manusia tidak bisa sepenuhnya direduksi ke dalam fakta-fakta empiris. Karena itu, pengumpulan tentang filsafat atau teologi misalnya menembusi seluruh batas-batas fakta yang dapat diamati dan memeriksa syarat-syarat rasional di baliknya.

Ketiga, mesti diupayakan pengujian atas proposisi ilmiah. Karena itu, metode yang digunakan ialah metode deduksi. Metode deduksi berusaha membuat pengujian atas teori yang telah dirumuskan. Karena itu, seorang peneliti misalnya mesti pertama-tama merumuskan teori dan kemudian mencari fakta untuk menguji teori bersangkutan. Dengan kata lain, pengalaman dilihat sebagai “alat uji” untuk membenarkan dan atau menyalahkan sebuah proposisi ilmiah.

2.2 Prinsip Falsifikasi

Bertolak pada metode deduksi sebagai kriteria demarkasi di atas, Popper menggagas teori falsifikasi untuk menunjukkan bahwa pengalaman hanya berfungsi untuk menyangkal sebuah proposisi ilmiah. Karena itu, dua unsur demarkasi yang dianggap penting ialah unsur falsifikasi dan unsur pengalaman.

Falsifikasi sebagai sebuah sistem pengujian atas teori menunjukkan bahwa setiap proposisi ilmiah selalu memiliki kemungkinan untuk salah. Karena itu, secara lebih ekstrem, Popper mengatakan bahwa kemungkinan untuk salah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh semua sistem teori.

Namun, kemungkinan untuk salah berbeda dengan teori falsifikasi. Teori falsifikasi adalah sebuah langkah metodologis yang dilakukan dengan cara deduktif untuk menguji sebuah teori. Sedangkan kemungkinan untuk salah merupakan sebuah kriteria dari semua teori

empiris. Popper memakai istilah “Korborasi” untuk menyatakan sebuah proposisi ilmiah telah lulus dari kritik.

Prinsip Falsifikasi adalah bahwa penerimaan terhadap sebuah hipotesis selalu bersifat sementara karena mesti ada langkah metodologis berikutnya untuk mengujinya. Semakin tahan uji atas kritik, semakin baik hipotesis tersebut. Karena itu, pengujian terhadap hipotesis mesti dilancarkan terus menerus. Namun, hal ini bukan berarti Popper menyangkal adanya kebenaran ilmiah. Popper tetap mengakui adanya kebenaran ilmiah tetapi kebenaran itu mesti terus diuji. Kebenaran ilmiah memang ada tetapi kita mesti terus menyangsikannya secara metodologis tanpa henti dengan mencari bukti untuk menyalahkannya.

III. Demokrasi di Indonesia

3.1 Pandangan Demokrasi secara Umum

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mengutamakan egalitarianisme di mana ada kesetaraan semua warga negara dalam pengambilan keputusan publik.¹³ Sistem pemerintahan demokrasi mengizinkan partisipasi secara luas semua warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan. Asas yang mendasari demokrasi ialah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Secara etimologis, Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani; *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi.

Demokrasi sudah dipraktikkan sejak abad ke-IV SM di Yunani. Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktikkan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yang berarti hak-hak rakyat untuk sebuah keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau

13 Darmawan Harefa, S.Pd, M.Pd, dan Drs. Fatolosa Hulu, M.M, *Demokrasi di Era Kemajemukan* (Banyumas: Publisher, 2020), hlm. 3.

warga negara.¹⁴ Dalam bagian ini dijelaskan dua aliran utama demokrasi yaitu Demokrasi Komunis dan Demokrasi Liberal-Kapitalis.¹⁵

Demokrasi komunis adalah demokrasi yang membatasi intervensi agama dalam kehidupan publik dan mengupayakan sebuah keberagaman yang bebas tanpa pembatasan. Di sini, agama tidak diperkenankan mengintervensi kebijakan publik karena agama dianggap candu yang dapat “memabukkan” warga negara terhadap konsep-konsep metafisis. Demokrasi komunis muncul karena komunisme yang memproposalkan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan. Sistem ini menganggap kepemilikan modal yang legitim adalah semua warga negara. Aliran demokrasi ini sebenarnya digagas oleh Karl Marx dan Lenin sehingga kerap disebut “Marxisme-Leninisme”. Marxisme mendapat inspirasi dari Lenin. Beberapa sintesis pandangan Lenin dan Marx dapat dirumuskan sebagai berikut.¹⁶

- Lenin lebih melihat peranan kaum petani dalam penyelenggaraan sebuah revolusi. Sedangkan Marx hanya melihat peranan kaum buruh dalam upaya membebaskan kaum buruh dari penghisapan para Kapitalis. Sintesis keduanya ialah akumulasi modal adalah akar ketidakadilan struktural yang menyiksa masyarakat kelas bawah. Karena itu, masyarakat kelas bawah mesti sadar akan ketertindasannya dan bangkit melawan para kapitalis. Ketidakadilan mesti dihapus dalam relasi-relasi sosial, politik dan ekonomi.
- Lenin melihat bahwa peranan partai politik yang militan sangat penting untuk memimpin kaum proletar, sedangkan Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri untuk mengadakan revolusi. Sintesis keduanya ialah bahwa gerakan sosial mesti berbasis sebuah kelompok yang legitim, yang menyatukan dan menyatakan kesadaran akan satu sistem yang menindas.
- Lenin melihat kapitalisme tidak akan mati karena imperialisme akan memperpanjang keberlangsungannya. Sedangkan Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada puncak perkembangannya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11-12.

akan musnah dan diganti oleh komunisme. Sintesis keduanya; perlawanan terhadap imperialisme ekonomi adalah tugas yang tidak berkesudahan. Imperialisme mesti terus digempur dan dilawan.

Tipe demokrasi yang kedua adalah Demokrasi Liberal-Kapitalis atau sering dikenal Demokrasi Barat. Tipe demokrasi ini menekankan hak-hak warga negara baik sebagai individu maupun kolektif. Dalam sistem demokrasi ini, kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan oleh penggagas teori kontrak sosial, Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Demokrasi liberal digunakan untuk mendeskripsikan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania dan Kanada.

Dalam demokrasi liberal-kapital, kapitalisme mempunyai pengertian sebagai perbuatan besar dari individu-individu yang melibatkan kontrol terhadap sumber daya dan menghasilkan kekayaan kepada seseorang atau kepada sebuah organisasi. Secara sederhana, kapitalisme berarti usaha mencari keuntungan secara terus menerus tetapi keuntungan yang dicari itu dilimpahkan sepenuhnya kepada pemilik modal. Di dalam sistem ini, bukan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi melainkan para pemilik modal. Di dalam sebuah negara, para pemilik modal adalah mereka yang memegang saham.

3.2 Demokrasi di Indonesia: Demokrasi (Berideologi) Pancasila

Demokrasi Pancasila menjadi jalan tengah bagi tegangan antara penyelenggaraan demokrasi komunis di satu sisi dan demokrasi liberal-kapitalis di sisi lain. Berbeda dengan negara otoriter yang menekankan kekuasaan yang sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa/pemimpin, dalam negara demokrasi Pancasila, seluruh penyelenggaraan kekuasaan menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Semua penyelenggaraan negara mesti berdasarkan nilai-nilai etis Pancasila.¹⁷

17 Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenita", *Jurnal Transnasional* 4:2 (Universitas Budi Luhur, 2013), hlm. 882.

Konstruksi demokratisasi adalah nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, butir-butir Pancasila mesti diamalkan dalam sistem pemerintahan negara. Pancasila menjiwai seluruh kehidupan bernegara. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluruh warga negara bebas memeluk agama tertentu berdasarkan keyakinannya. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menganut paham humanisme integral; penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengupayakan sikap untuk menerima perbedaan dan keberagaman untuk saling bekerja sama dan saling menghargai. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, adalah upaya untuk menghargai aspirasi dan keterbukaan terhadap kritik. Di sini, demokrasi mendapat pendasaran konseptual-teoretis.¹⁸ Seluruh pengambilan kebijakan mesti menghargai mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu filosofi untuk bersikap adil terhadap semua orang dan mengupayakan kesejahteraan kepada semua masyarakat tanpa tebang pilih.

Berkaca dari sistem demokrasi di Indonesia yang berideologi Pancasila, sekurang-kurangnya terdapat empat kekuatan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan¹⁹. *Pertama*, demokrasi memungkinkan kebebasan individual. Kebebasan-kebebasan itu bisa berupa kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan berserikat dan berkumpul. Negara demokrasi akan menjamin kebebasan individual secara konstitusional. *Kedua*, Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik. Warga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, dalam setiap kebijakan umum, warga negara dilibatkan baik secara langsung seperti dalam Pemilu maupun secara tidak langsung (perwakilan) melalui badan legislatif. *Ketiga*, demokrasi bekerja atas dasar prinsip persaingan. Prinsip ini bisa juga disebut persaingan tanpa represi. Jadi, setiap orang berhak untuk mengembangkan usaha tanpa represi. *Keempat*,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik, Negara dalam bentangan Diskursus Filosofis* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2013), hlm. 101-102.

demokrasi mengedepankan cara-cara efisien, transparan dan fleksibel dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Prinsip musyawarah untuk mufakat mengedepankan transparansi atau keterbukaan.

Namun, hemat penulis demokrasi sebenarnya merupakan sebuah sistem pemerintahan yang paling menantang dewasa ini. Hal ini dikarenakan orang bebas untuk berbicara dan mengungkapkan aspirasi. Hak berbicara dianggap sebagai hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang. Namun, serentak kebebasan berbicara ini kerap kali digunakan untuk mengklaim kebenaran-kebenaran parsial doktrinal seperti kebenaran agama. Tantangan terbesar demokrasi ialah adanya pendakuan kebenaran tunggal dalam ruang publik.²⁰

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila. Pancasila telah dirumuskan sebagai dasar dan pedoman etis seluruh praktek demokrasi. Sila-sila Pancasila menjaga agar nilai-nilai etis Indonesia tidak digusur oleh paham radikalisme warga negara dalam mengklaim kebenaran-kebenaran tunggal.²¹

IV. Teori Falsifikasi Karl Popper dan Demokrasi di Indonesia: Menemukan Pararelitas

Teori Falsifikasi Popper dan sistem demokrasi di Indonesia memiliki paradigma yang sama. Corak ini menunjukkan bahwa demokrasi yang dipraktekkan dan teori falsifikasi yang diterapkan dalam penelitian ilmiah memiliki orientasi yang sama yaitu melawan klaim kebenaran tunggal dan mengupayakan kritik rasional untuk menunjang progresivitas. Hemat penulis, falsifikasi paralel dengan sistem demokrasi di Indonesia. Pembuktian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, teori falsifikasi menganggap kritik adalah “pisau bedah” untuk sebuah proposisi ilmiah. Kritik adalah upaya untuk menguji

20 Peter Tan, *Paradoks Politik, Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018), hlm. 51.

21 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 444.

apakah sebuah proposisi dikatakan ilmiah atau tidak. Kritik dalam konteks ini menjadi kriterium utama dalam ilmu pengetahuan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kritik adalah manifestasi dari upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat.²² Musyawarah untuk mufakat adalah sebuah upaya deliberasi ruang publik serentak di sisi lain membuka argumentasi rasional untuk menguji sebuah kebijakan umum. Di sini, sebenarnya terdapat sebuah imperatif bahwa upaya “tukar tambah” ide adalah sebuah hal yang secara demokratis mutlak. Kritik berarti menguraikan secara tuntas. Persis, kritik pada titik paling ekstrem adalah mencari titik lemah dari sebuah proposisi agar proposisi tersebut menjadi lebih rasional dan dapat diterima.²³ Hal itu berarti, kritik diperlukan untuk membantah secara radikal sebuah proposisi.²⁴ Seorang warga negara karena itu mesti bersikap kritis terhadap setiap kebijakan-kebijakan publik.

Kedua, bersamaan dengan kriterium kritik maka sebagaimana dalam teori falsifikasi, proposisi ilmiah mesti diupayakan secara deduktif. Cara kerja deduktif berupaya untuk menguji teori dengan fakta-fakta empiris. Falsifikasi sama sekali tidak berupaya untuk mengamankan teori atau memverifikasinya. Dalam demokrasi pun, fakta-fakta empiris dalam negara mesti menjadi sebuah titik tolak untuk menguji setiap konsep yang diucapkan di ruang publik.²⁵ Hal itu berarti, setiap kebijakan mesti dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan sebaliknya, dirumuskan kebijakan-kebijakan dan dicari konfirmasi dalam realitas aktual. Prinsip ini menunjukkan bahwa antara demokrasi dan falsifikasi terdapat kesamaan prinsip. Dalam demokrasi, diskursus publik justru berangkat dari realitas. Kebijakan-kebijakan dibuat berdasarkan diskursus atas masalah-masalah aktual. Persoalan terbesar dalam demokrasi ialah upaya mengamankan kesimpulan sebelum diskusi dimulai. Hal ini kerap terjadi karena kemabukan atas kebenaran-kebenaran parsial seperti

22 F. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas, dari Bangsa Setan-Setan, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 56.

23 Franz Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat, dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 56.

24 *Ibid.*

25 F. Budi Hardiman, *op. cit.* hlm. 213.

doktrin-doktrin agama. Doktrin agama kerap dibawa ke ruang publik dan mensakralisasi semua diskursus. Tendensi umum yang kerap terjadi ialah doktrin agama dianggap sebagai kebenaran tetap dan tunggal yang dipaksakan menjadi rujukan umum. Karena itu, sentimen agama cepat tersulut dengan dalih ‘agama dilecehkan’ ketika ada arus tandingan yang berupaya mengucapkan argumentasi rasional yang lebih akomodatif.

Ketiga, teori falsifikasi mau menunjukkan bahwa kesalahan selalu mungkin bagi semua proposisi ilmiah. Upaya semua peneliti ialah mau menunjukkan letak kesalahan itu. Di dalam demokrasi, kemungkinan untuk salah juga selalu terbuka. Tidak ada satu kebenaran yang benar-benar resisten terhadap kritik. Pemerintahan yang demokratis ialah pemerintahan yang selalu terbuka bagi kritik karena ia sadar bahwa kesalahan selalu melekat *in se* dalam dirinya.²⁶ Kesalahan itu bisa dibuktikan kapan saja, oleh siapa saja. Karena itu, sikap yang terbaik terhadap kesalahan ialah selalu berupaya membuka diri bagi kritik. Dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, beberapa pejabat publik kerap kebal terhadap kritik padahal kesalahan mereka jelas-jelas terbukti.²⁷ Upaya berkelit dan koncoisme dalam tubuh rezim dan instansi ialah ancaman lain terhadap demokrasi.

Keempat, falsifikasi memperjelas demarkasi antara pernyataan ilmiah dan non ilmiah dengan mengajukan tesis bahwa ilmu-ilmu empiris maupun metafisika, logika dan matematika mesti konsisten dengan metode ilmunya masing-masing. Kaum positivis kerap mereduksi semua pengetahuan hanya pada fakta-fakta empiris yang diamati. Menurut Popper, hal itu terlalu prematur sebab masing-masing ilmu memiliki metode yang khas. Filsafat dan Teologi membuat refleksi yang lebih mendalam daripada pengamatan indrawi semata. Popper menganggap kaum positivis terlalu ekstrem membuat demarkasi antara pernyataan ilmiah dan non ilmiah dengan hanya berpatok pada fakta-fakta empiris. Dalam negara demokrasi khususnya di Indonesia, demarkasi benar-salah, surga-dunia kerap menjadi persoalan pelik. Agama-agama kerap membawa masuk klaim-klaim seperti ini. Demarkasi yang terlalu ekstrem

²⁶ Peter Tan, *loc. cit.*

²⁷ *Ibid.*

dalam negara demokrasi akan membawa keterpecahan dan fragmentasi dalam masyarakat.²⁸ Demarkasi yang berlebihan diakibatkan pandangan yang kurang komprehensif atas persoalan-persoalan publik.

Dengan uraian di atas maka dapat dikatakan falsifikasi dan sistem demokrasi di Indonesia memiliki paralelitas. Demokrasi di Indonesia berideologi Pancasila memungkinkan multikulturalisme bertumbuh subur. Adanya keterbukaan sambil tercipta penghargaan terhadap yang lain sebagai warga negara. Falsifikasi juga sebuah sikap keterbukaan untuk mengkritik dan dikritik. Falsifikasi dengan demikian kompatibel dengan demokrasi yang bernafaskan Pancasila karena di sana ada keterbukaan untuk diuji serentak ada imperatif penghargaan terhadap kritik dari siapa pun. Kritik dan pengujian terus menerus niscaya akan membawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin baik dari hari ke hari.

V. Penutup

Teori Falsifikasi Karl Popper menunjukkan bahwa upaya pendakuan kebenaran merupakan bentuk paling banal dari usaha mencapai pengetahuan yang sah di satu sisi dan sebuah tindakan mencederai tatanan sosial-politik yang baik dan adil dari konteks demokrasi di sisi lain. Demokrasi sama sekali tidak menginginkan klaim-klaim kebenaran parsial. Kebenaran selalu dicari terus menerus melalui pengujian argumentatif. Pendakuan kebenaran adalah bentuk penyangkalan terhadap hakikat demokrasi serentak melawan prinsip ilmu pengetahuan. Demokrasi dan Falsifikasi, dengan demikian memiliki paralelitas.

Tuduhan irrelevansi dan ambruknya Filsafat dengan demikian bisa ditepis karena Filsafat justru menjadi basis metodis konseptual bagi demokrasi. Sejalan dengan kritik Popper terhadap positivisme, Filsafat justru melampaui sekedar pengetahuan empiris indrawi (tindak berarti meminggirkan hal-hal empiris) untuk menguji dan memeriksa setiap persoalan secara rasional.

28 Miriam Budiardjo, *loc. cit.*

Daftar Pustaka

- Anurr, Cindy Mutiar. “Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi cenderung Menurun”. *ataboks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>, diakses pada 4 Oktober 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Damayanti, Ninin Prima dkk. “Radikalisme Agama sebagai salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3:1. Departemen Kriminologi UI, 2003.
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis*. Maumere: Penerbit Ledalero. 2007.
- Fadlin, “Stephen Hawking dan Kematian Filsafat” dalam *alif.id*, <https://alif.id/read/fdl/stephen-hawking-dan-kematian-filsafat-b236614p/>, diakses pada 21 Oktober 2022.
- Farisa, Fitria Chusna. *Kompas. Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>, diakses pada 30 November 2021.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas, dari Bangsa Setan-Setan, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Harefa, Darmawan dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi di Era Kemajemukan*. Banyumas: Publisher, 2020.
- Madung, Otto Gusti. *Filsafat Politik, Negara dalam bentangan Diskursus Filosofis*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Tan, Peter. *Paradoks Politik, Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.
- Tjarsono, Idjang. “Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenita”, *Jurnal Transnasional* 4:2. Universitas Budi Luhur, 2013.
- Tukan, Paulus Berekama. “Buzzer Politik Pembajak Demokrasi?”. *Jurnal Akademika* 30:2. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

- Suseno, Franz Magnis. *Pijar-Pijar Filsafat, dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Yazdi, Aly Asgari. *Sejarah Skeptisisme, Jatuh Bangun Paham Keraguan atas Kebenaran*. Jakarta: Sadra Press, 2016.
- Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.